

PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN FASILITAS UMUM KAMPUNG RUKUN DAMAI KECAMATAN LONG BAGUN KABUPATEN MAHAKAM ULU TAHUN 2016

Julius Herman¹

Abstrak

Kampung Rukun Damai Kecamatan Long Bagun merupakan salah satu kampung di Kabupaten Mahakam Ulu yang sedang giat membangun fasilitas umum kampung. Tujuan ini didukung dengan terbentuknya Mahakam Ulu sebagai salah satu daerah pemekaran serta pemberian dana desa dari pemerintah pusat untuk mempercepat pembangunan desa. Pembangunan di Kampung Rukun Damai akan berjalan lancar jika melibatkan partisipasi masyarakat.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dan kuantitatif untuk mendeskripsikan pembangunan fasilitas umum dan untuk tingkat mengetahui tingkat partisipasi masyarakat baik pada tahap assessment, tahap perencanaan, tahap peaksanaan, dan tahap evaluasi. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara, observasi, kuisisioner, dan kajian dokumentasi. Langkah-langkah analisis data setelah data terkumpul meliputi reduksi data, melihat hubungan antar variabel atau fenomena, dan menarik kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada pembangunan posyandu dan pembangunan jalan kampung melibatkan partisipasi masyarakat mulai tahap assessment, tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, dan tahap evaluasi. Pada tahap assessment, tahap perencanaan, dan tahap evaluasi tidak semua warga dilibatkan, hanya mengundang tokoh-tokoh masyarakat dan pihak lain yang memahami posyandu dan jalan kampung. Partisipasi masyarakat paling besar pada tahap pelaksanaan, hampir semua warga dilibatkan. Hal ini sejalan dan berhubungan dengan hasil kuisisioner yang menyatakan bahwa tingkat partisipasi masyarakat rendah pada tahap assessment, tahap perencanaan, dan tahap evaluasi, dan tingkat partisipasi masyarakat tinggi pada tahap pelaksanaan pembangunan.

Saran yang diberikan adalah agar aparat desa lebih banyak lagi melibatkan warga masyarakat pada tahap assessment, tahap perencanaan, dan tahap evaluasi.

Kata Kunci: Partisipasi Masyarakat, Fasilitas Umum

Pendahuluan

Latar Belakang

Dalam pelaksanaan pembangunan pedesaan, pemerintah haruslah mendasarkan pada pengakuan akan peranan penting yang dimainkan oleh

¹ Mahasiswa Program S1 Sosiatri-Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: juliyus_goes@gmail.com

pedesaan sejak dahulu. Hal ini didasarkan pada asumsi bahwa desa mempunyai makna yang strategis bagi setiap pertumbuhan. T.R. Battern (Soebroto, 2008) menegaskan pembangunan masyarakat desa merupakan suatu proses dimana orang-orang yang ada di masyarakat tersebut pertama-tama mendiskusikan dan menentukan keinginan mereka kemudian merencanakan dan mengerjakan bersama-sama memenuhi keinginan mereka. Jadi dalam pembangunan masyarakat desa merupakan tindakan kolektif, dalam artian material dan spiritual.

Ndraha (2000) memberikan beberapa kriteria yang terdapat dalam pembangunan masyarakat desa, yaitu : adanya partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan, adanya rasa tanggungjawab masyarakat terhadap pembangunan, kemampuan masyarakat desa untuk berkembang telah dapat ditingkatkan, prasarana fisik telah dapat dibangun dan dipelihara, lingkungan hidup yang serasi telah dapat dibangun dan dipelihara.

Pembangunan juga menuntut adanya partisipasi masyarakat, sehingga mencerminkan bahwa masyarakat adalah sebagai subjek dan bukan objek pembangunan, yang mencakup berbagai aspek permasalahan baik di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya dan pertahanan keamanan yang menjadi tumpuan dan sasaran pembangunan. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan nasional merupakan suatu proses yang multidimensional, yang membawa perubahan dan akan menimbulkan pengaruh serta dampak yang berangkai terhadap berbagai aspek atau bidang kehidupan bangsa dan negara. Konsekuensi logis proses itu adalah pelibatan seluruh lapisan masyarakat dalam satu usaha bersama dengan semangat kekeluargaan yang dilakukan secara gotong-royong oleh seluruh masyarakat.

digunakan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan yang ditetapkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja penyelenggaraan urusan wajib diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum. Demikian yang disebut dalam Romawi III angka 2 tentang Kebijakan Penyusunan APBD dalam Uraian Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2015 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Permendagri 37/2014).

Kampung Rukun Damai, Kecamatan Long Bagun Kabupaten Mahakam Ulu, Provinsi Kalimantan Timur merupakan desa yang dapat dikategorikan desa yang belum maju jika dilihat dari keberadaan fasilitas-fasilitas desa. Banyak fasilitas-fasilitas desa yang belum dapat dibangun karena terkendala masalah pendanaan. Sebagian besar jalan desa masih seperti puluhan tahun yang lalu, belum diaspal atau dicor sebagaimana jalan-jalan di

kota. Posyandu sebagai sarana kesehatan bagi masyarakat belum dibangun, pada saat pelayanan seperti imunisasi, timbang badan balita, dan lain-lain hanya memanfaatkan rumah-rumah warga. Sanitasi lingkungan masih seadanya (parit kurang dalam dan kurang lebar) sehingga sering menjadi penyebab genangan air di beberapa wilayah desa. Demikian juga halnya dengan fasilitas WC umum. Walaupun jumlahnya cukup, tapi kondisinya kurang memenuhi syarat kesehatan. Jika dibandingkan dengan desa-desa terdekat lainnya, terutama yang dekat dengan ibukota kabupaten, pembangunan desa Long Bagun dapat dikatakan tertinggal dalam hal kelengkapan fasilitas umum desa.

Rumusan Masalah

Bagaimana tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan fasilitas umum di Kampung Rukun Damai Kecamatan Long Bagun Kabupaten Mahakam Ulu tahun 2016?

Tujuan Penelitian

1. Mengukur indeks partisipasi warga dalam tahap assessment, tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, dan tahap evaluasi pembangunan fasilitas umum Kampung Rukun Damai Kecamatan Long Bagun Kabupaten Mahakam Ulu tahun 2016.
2. Mendeskripsikan partisipasi warga pada tahap assesment, tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, dan tahap evaluasi pembangunan fasilitas umum Kampung Rukun Damai Kecamatan Long Bagun Kabupaten Mahakam Ulu tahun 2016.
3. Menganalisis bentuk dan tingkat (kualitas) partisipasi masyarakat dalam pembangunan fasilitas umum Kampung Rukun Damai Kecamatan Long Bagun Kabupaten Mahakam Ulu tahun 2016.

Manfaat Penelitian

Teoritis

1. Penelitian ini diharapkan dapat memperdalam kajian sosiologis tentang partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa.
2. Bagi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman, penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk melengkapi ragam penelitian yang telah dilakukan oleh para mahasiswa. Serta menjadi bahan masukan bagi fakultas dan menjadi salah satu referensi tambahan bagi mahasiswa/mahasiswi di masa yang akan datang.

Praktis

1. Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur maupun Pemerintah Mahakam Ulu dalam mengambil kebijakan-kebijakan dalam rangka perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa.

2. Bagi penulis, penelitian ini merupakan usaha untuk meningkatkan kemampuan berfikir melalui penulisan karya ilmiah dan untuk menerapkan teori-teori yang penulis peroleh selama perkuliahan.
3. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu sumbangan pemikiran dalam implementasi dana desa sesuai amanat Undang-Undang.

Kerangka Dasar Teori

Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat merupakan salah satu aspek yang penting dalam pembangunan daerah. Partisipasi masyarakat dapat dijadikan indikator keberhasilan suatu pembangunan. Memperhatikan berbagai karakteristik dari strategi pembangunan sumber daya berbasis komunitas, maka dalam pelaksanaannya terkandung suatu unsur yang dapat dikatakan mutlak, yaitu partisipasi masyarakat lokal.

Pengertian Partisipasi

Kata partisipasi berasal dari bahasa Inggris yaitu "*Participation*", *take a part*, artinya peran serta atau ambil bagian atau kegiatan bersama-sama dengan orang lain. Partisipasi merupakan keterlibatan mental atau pikiran dan emosi perasaan sumbangan dalam usaha mencapai tujuan serta turut tanggung jawab terhadap usaha yang bersangkutan. Dalam kamus lengkap Bahasa Indonesia dijelaskan "partisipasi" diartikan sebagai hal turut berperan serta dalam suatu kegiatan, keikutsertaan, peran serta (KBBI, 2008).

Partisipasi dalam urusan publik belakangan ini menjadi sorotan. Banyak kalangan yang menggunakan kata partisipasi sehingga tanpa kata partisipasi rasanya diskusi, seminar, musyawarah ataupun kebijakan yang diluncurkan kurang mendapatkan tempat di masyarakat. Kata ini dikaitkan dengan kegiatan-kegiatan yang bernuansa pembangunan, kebijakan dan pelayanan pemerintah. Sementara akhiran "tif" menunjukkan kata sifat yaitu untuk menerangkan kata dasarnya, sehingga partisipatif lebih bermakna sebagai kata sifat yang menjelaskan proses (Jakti, 1987).

Partisipasi Masyarakat

Arnstein (dalam Saragi, 2004) menetapkan tipologi yang dikenal dengan delapan anak tangga partisipasi masyarakat, yang menjelaskan peran serta masyarakat di dasarkan pada kekuatan masyarakat, yaitu :

- a. *Manipulation* dapat diartikan relatif tidak ada komunikasi apalagi dialog.
- b. *Therapy*, berarti telah ada komunikasi tetapi masih bersifat terbatas, inisiatif datang dari pemerintah dan hanya satu arah.
- c. *Information* menyiratkan bahwa komunikasi sudah mulai banyak terjadi tetapi masih bersifat satu arah.
- d. *Consulation*, berarti komunikasi telah terjadi dua arah.

- e. *Placation*, berarti bahwa komunikasi telah berjalan dengan baik dan sudah ada kesepakatan antara masyarakat dengan pemerintah.
- f. *Partnership*, adalah kondisi dimana pemerintah dan masyarakat mitra sejajar.
- g. *Delegated power*, bahwa pemerintah memberikan kewenangan kepada masyarakat untuk mengurus sendiri keperluannya.
- h. *Citizen Control* bermakna bahwa masyarakat menguasai kebijakan publik dan perumusan, implementasi hingga evaluasi dan kontrol.

Menurut Rukminto (2008:252), partisipasi masyarakat atau keterlibatan masyarakat dalam pembangunan dapat dilihat dalam beberapa tahapan, yaitu :

1. Tahap Assesment
Dilakukan dengan mengidentifikasi masalah dan sumber daya yang dimiliki. Untuk ini masyarakat dilibatkan secara aktif merasakan permasalahan yang sedang terjadi yang benar-benar keluar dari pandangan mereka sendiri.
2. Tahap Perencanaan Alternatif Program atau Kegiatan
Dilakukan dengan melibatkan warga untuk berfikir tentang masalah yang mereka hadapi dan cara mengatasinya dengan memikirkan beberapa cara alternatif program.
3. Tahap Pelaksanaan (Implementasi) Program atau Kegiatan
Dilakukan dengan melaksanakan program yang sudah direncanakan dengan baik agar tidak melenceng dalam pelaksanaannya di lapangan sehingga tahapan ini dianggap sebagai tahapan yang paling krusial.
4. Tahap Evaluasi (termasuk evaluasi Input, Proses dan Hasil)
Dilakukan dengan adanya pengawasan dari masyarakat dan pemerintah terhadap program yang sedang berjalan.

Menurut Keith Davis (Reksopoetranto, 1992), kata partisipasi secara etimologis berasal dari bahasa inggris “participation” yang berarti mengambil bagian, participator dimaknai sebagai yang mengambil bagian atau sering disebut dalam bahasa umum sebagai keikutsertaan. Karenanya partisipasi sering dikatakan sebagai peran serta atau keikutsertaan mengambil bagian dalam kegiatan tertentu. Karenanya terdapat keterlibatan mental/pikiran dan emosi/perasaan seseorang dalam situasi kelompok yang mendorong partisipan untuk memberikan sumbangan kepada kelompok dalam usaha mencapai tujuan serta tanggungjawab terhadap usaha mencapai tujuan yang bersangkutan.

Bentuk-bentuk Partisipasi Masyarakat

Sebagai bentuk keikutsertaan masyarakat/kelompok terdapat beberapa wujud dari partisipasi :

1. Menurut Vaneklasen dan Miller dalam Handayani (2006), bentuk-bentuk partisipasi terdiri atas :
 - a. Partisipasi Simbolis

Masyarakat duduk dalam lembaga resmi tanpa melalui proses pemilihan dan tidak mempunyai kekuasaan yang sesungguhnya.

b. Partisipasi Pasif

Masyarakat diberi informasi atas apa yang sudah diputuskan dan apa yang sudah terjadi. Pengambil keputusan menyampaikan informasi tetapi tidak mendengarkan tanggapan dari masyarakat sehingga informasi hanya berjalan satu arah.

c. Partisipasi Konsultatif

Masyarakat berpartisipasi dengan cara menjawab beberapa pertanyaan. Hasil jawaban dianalisis pihak luar untuk identifikasi masalah dan cara pengatasan masalah tanpa memasukkan pandangan masyarakat.

d. Partisipasi dengan Insentif Material

Masyarakat menyumbangkan tenaganya untuk mendapatkan makanan, uang, atau imbalan lainnya. Masyarakat menyediakan sumber daya, namun tidak terlibat dalam pengambilan keputusan sehingga mereka tidak memiliki keterikatan untuk meneruskan partisipasinya ketika masa pemberian insentif selesai.

e. Partisipasi Fungsional

Masyarakat berpartisipasi karena adanya permintaan dari lembaga eksternal untuk memenuhi tujuan. Mungkin ada keputusan bersama tetapi biasanya terjadi setelah keputusan besar diambil.

f. Partisipasi Interaktif

Masyarakat berpartisipasi dalam mengembangkan dan menganalisa rencana kerja. Partisipasi dilihat sebagai hak, bukan hanya sebagai alat mencapai tujuan, prosesnya melibatkan metodologi dalam mencari perspektif yang berbeda dan serta menggunakan proses belajar yang terstruktur. Karena masyarakat terlibat dalam pengambilan keputusan maka mereka akan mempunyai keterikatan untuk mempertahankan tujuan dan institusi lokal yang ada di masyarakat juga menjadi kuat.

g. Pengorganisasian Diri

Masyarakat berpartisipasi dengan merencanakan aksi secara mandiri. Mereka mengembangkan kontak dengan lembaga eksternal untuk sumber daya dan saran-saran teknis yang dibutuhkan, tetapi kontrol bagaimana sumber daya tersebut digunakan berada di tangan masyarakat sepenuhnya.

Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Partisipasi

Faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi menurut Slamet (1993:137-143) antara lain:

1. Jenis kelamin
2. Tingkat pendidikan
3. Tingkat penghasilan
4. Mata pencaharian/pekerjaan

5. Usia

6. Lama tinggal

Selain faktor-faktor lain yang diungkapkan Slamet dan Iffe di atas, faktor lain yang mempengaruhi partisipasi diantaranya adalah :

1. Pengetahuan

2. Kebiasaan

3. Penerimaan orang luar

4. Keberadaan lembaga penyelenggara program

5. Kemampuan beroorganisasi masyarakat

6. Kebermanfaatan program

7. Keluarga

Prasyarat Partisipasi

Menurut Davis dalam Sastropetro (2008:16-18), prasyarat untuk dapat melaksanakan partisipasi secara efektif adalah sebagai berikut:

1. Adanya waktu.

2. Kegiatan partisipasi memerlukan dana perangsang secara terbatas.

3. Subyek partisipasi hendaklah berkaitan dengan organisasi dimana individu yang bersangkutan itu tergabung atau sesuatu yang menjadi perhatiannya.

4. Partisipan harus memiliki kemampuan untuk berpartisipasi dalam arti kata yang bersangkutan memiliki pemikiran dan pengalaman yang sepadan.

5. Kemampuan untuk melakukan komunikasi timbal balik.

6. Bebas melaksanakan peran serta sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan.

7. Adanya kebebasan dalam kelompok, tidak adanya pemaksaan atau penekanan.

Metode Penelitian

Jenis Penelitian

Penelitian tentang “Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Fasilitas Umum di Kampung Rukun Damai Kecamatan Long Bagun, Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2015” adalah penelitian yang bersifat studi kasus (*case study*). Hal ini disebabkan penelitian hanya dilakukan di Kampung Rukun Damai Kecamatan Long Bagun, Kabupaten Mahakam Ulu. Penelitian ini juga mengumpulkan informasi dari beberapa kasus pembangunan fasilitas umum seperti pembangunan jalan, pembangunan sekolah, pembangunan posyandu, pembangunan saluran air, dan pembangunan MCK.

Kerangka Perbandingan Studi Kasus

Penelitian ini dilakukan untuk memperoleh gambaran utuh mengenai partisipasi masyarakat Kampung Rukun Damai Kecamatan Long Bagun,

Kabupaten Mahakam Ulu dengan jalan menggabungkan informasi-informasi mengenai partisipasi masyarakat pada beberapa kasus pembangunan fasilitas umum. Deskripsinya adalah sebagai berikut :

Pada pembangunan jalan, peneliti mengumpulkan informasi mengenai partisipasi masyarakat pada tahap assesment, tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, dan tahap evaluasi pembangunan jalan di Kampung Rukun Damai Kecamatan Long Bagun Kabupaten Mahakam Ulu. Informasi diperoleh dengan melakukan observasi dan keterangan langsung dari sumber-sumber yang mengetahui dan terlibat langsung pada tahap-tahap pembangunan jalan. Hal yang sama juga dilakukan pada kasus pembangunan fasilitas umum lainnya yaitu pembangunan sekolah, pembangunan posyandu, dan pembangunan MCK.

Sumber Data dan Cara Pengumpulan Data

1. Data Primer yaitu data penelitian yang diperoleh dengan cara pengumpulan data yang dilakukan secara langsung dari lapangan pada lokasi penelitian sesuai dengan masalah yang diteliti. Data primer diperoleh dari observasi, wawancara mendalam dan survey.
2. Data sekunder, yaitu data yang dikumpulkan yang bersumber dari studi pustaka dan dokumentasi yang diperlukan untuk mendukung data primer. Studi pustaka pada penelitian ini diperoleh melalui literatur yang relevan dengan judul penelitian seperti buku-buku, jurnal (digunakan pada Bab II), dokumen kependudukan (Bab IV) yang memiliki relevansi dengan masalah yang diteliti.

Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan wawancara, observasi, survei, dan pengkajian dokumen. Hal ini didasarkan atas pendapat Lincoln dan Guba (1985) yang menyatakan pengumpulan data kualitatif menggunakan wawancara, observasi, dan dokumen (catatan atau arsip) dan studi pustaka. Secara rinci pengumpulan data dalam penelitian ini diperoleh dengan menggunakan teknik sebagai berikut :

Observasi

Wawancara Mendalam

Survei

Dokumentasi

Teknik Analisis Data

Analisis Data Kualitatif

Analisis data adalah proses menyusun data agar dapat ditafsirkan dan diketahui maknanya (Nasution:2003:126). Analisis dikerjakan sejak peneliti mengumpulkan data dan dilakukan secara intensif setelah pengumpulan data selesai. Analisis data dalam penelitian ini yang digunakan adalah analisis kualitatif deskriptif (Milles dan Huberman 1992:20). Proses analisis ini

dilakukan selama proses penelitian. Dalam teknik ini ada tiga komponen pokok analisis yaitu reduksi data, sajian data dan penarikan kesimpulan yang kesemuanya itu difokuskan pada tujuan penelitian. Namun karena sifat penelitian kualitatif yang fleksibel, segala sesuatunya ditentukan oleh hasil akhir pengumpulan data yang mencerminkan keadaan yang sebenarnya di lapangan.

Data Kuantitatif

Nilai Indeks Partisipasi Masyarakat dihitung dengan menggunakan "nilai rata-rata tertimbang" masing-masing unsur pelayanan. Dalam penghitungan indeks partisipasi masyarakat terhadap 4 tahapan partisipasi yang dikaji.

Hasil Penelitian

Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Posyandu

Masyarakat sebagai elemen penting dari pembangunan dirasa perlu dituntut untuk berperan aktif dalam setiap hal yang berhubungan dengan pembangunan baik itu pembangunan di tingkat Desa/kampung, Kecamatan ataupun Pusat, dengan kata lain partisipasi masyarakat sangat berguna bagi pembangunan dimana saja. Partisipasi masyarakat sesuai dengan model pembangunan saat ini tentu masih menjadi pertanyaan di segala sisi pembangunan itu sendiri. Sudah sepantasnya sebagai anggota masyarakat menunjukkan perilaku pembangunan yang partisipatif demikian pula dengan pemerintahan yang sedang mengemban tugas pengelolaan pembangunan di daerah. Artinya setiap pihak tentunya memposisikan dirinya pada porsi yang proporsional dalam setiap upaya pembangunan.

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, didapatkan berbagai informasi dan data tentang fenomena partisipasi masyarakat di Kampung Rukun Damai Kecamatan Long Bagun yang masih memerlukan perhatian serta langkah konkrit dari seluruh elemen masyarakat.

Pembangunan posyandu di Kampung Rukun Damai Kecamatan Long Bagun Kabupaten Mahakam Ulu sangat melibatkan partisipasi masyarakat baik pada tahap assessment, tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, dan tahap evaluasi. Tahap assessment dan tahap perencanaan tidak melibatkan seluruh masyarakat, namun melibatkan tokoh-tokoh dan pengurus Posyandu yang sudah terbentuk. Pada tahap assessment, aparat desa mengidentifikasi permasalahan-permasalahan yang ada dan ditemukan pada masing-masing RT dan Posyandu, selain itu juga mengidentifikasi sumber daya yang ada sehingga diketahui jumlah posyandu, jumlah pengurus, keadaan bangunan posyandu, peralatan yang dimiliki posyandu, dan lain-lain. Pada tahap perencanaan didiskusikan mengenai alternatif pemecahan masalah, pembiayaan, pola pembangunan, dan lain-lain. Hasil musyawarah diputuskan bahwa pembangunan dan rehab posyandu menggunakan dana melalui program PNPM.

Sedangkan pada tahap pelaksanaan, partisipasi masyarakat sangat besar. Hampir semua warga dilibatkan dalam pembangunan Posyandu karena posyandu merupakan fasilitas bersama yang sangat penting manfaatnya bagi masyarakat Kampung Rukun Damai. Pada tahap evaluasi partisipasi masyarakat kembali menurun. Hanya sebagian kecil warga yang ikut dalam mengawasi pembangunan posyandu baik pada tahap assessment, tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, dan tahap evaluasi.

Peran ibu-ibu dan kader Posyandu lainnya pada pembangunan Posyandu cukup besar. Berdasarkan hasil wawancara dengan informan bahwa semua informan terlibat dalam pelaksanaan program. Ibu Arending, Igit Ajang, dan Urai Iban yang mempunyai balita selalu hadir dalam setiap kegiatan pelayanan kesehatan di posyandu. Begitu juga dengan Normah dan Ibu Rosmaria yang hadir dalam pelayanan kesehatan balita sebagai kader, dimana keberadaan mereka juga didukung oleh kehadiran kader lainnya.

Hal yang dilakukan oleh para ibu merupakan bentuk keterlibatan mereka dalam pelaksanaan program, baik sebagai ibu yang membawa balitanya setiap bulan ke posyandu maupun sebagai kader yang memberikan pelayanan kesehatan di posyandu. Hal ini pula menjadi salah satu unsur keberhasilan posyandu Nusa Indah II Kampung Rukun Damai menjadi posyandu mandiri, dimana salah satu indikatornya dilihat dari segi jumlah kehadiran para kader yang bertugas pada hari buka posyandu. Dimana jumlah kader yang hadir selalu 5 orang.

Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Jalan Kampung

Sama seperti pembangunan posyandu, pada tahapan pembangunan jalan kampung partisipasi masyarakat juga cukup besar baik pada tahap assessment, tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, maupun tahap evaluasi. Perbedaan dengan pembangunan fasilitas posyandu, pada pembangunan jalan kampung selain partisipasi masyarakat juga mendapat bantuan dari pemerintah kabupaten dan bantuan dari perusahaan (CSR).

Sebagaimana diketahui bahwa penduduk Rukun Damai merupakan pendatang. Jadi untuk jalan kampung mereka sudah berpartisipasi sejak tahap assessment dan tahap perencanaan. Pada awal pembangunan jalan kampung mereka bermusyawarah dan bermufakat untuk membangun jalan-jalan kampung untuk kenyamanan dalam beraktifitas sehari-hari seperti berkebun dan berladang, keluar masuk kampung. Sumber daya yang mereka miliki pada awal pembangunan hanya berupa tenaga dan pikiran. Dalam tahap pelaksanaan, semua warga berpartisipasi aktif bergotong royong, menyumbang tenaga, pikiran, dan materi yang dimiliki (makanan, minuman). Pembangunan jalan kampung baru berupa jalan tanah.

Seiring berjalannya waktu, perbaikan jalan kampung terus meningkat kualitasnya. Jalan yang berupa jalan tanah ditingkatkan dengan jalan dari bahan semen (cor-coran). Pada tahap ini pembangunan jalan selain melibatkan warga,

pemerintah juga terlibat memberikan bantuan melalui program PNPM. Akhirnya Kampung Rukun Damai memiliki jalan kampung dengan kualitas yang baik.

Jika terjadi kerusakan pada jalan kampung, warga segera melakukan gotong royong memperbaikinya. Perbaikan jalan juga sering dibantu pendanaannya dari sumbangan yang beroperasi di Mahakam Ulu melalui program CSR.

Indeks Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Fasilitas Umum ***Pembangunan Posyandu***

Berdasarkan hasil angket yang disebarakan kepada 50 responden diketahui bahwa indeks partisipasi masyarakat pada tahap assessment, tahap perencanaan, dalam kategori tinggi. Pada tahap pelaksanaan, indeks partisipasi masyarakat sangat tinggi, sedangkan pada tahap evaluasi termasuk rendah.

Hasil kuisioner menunjukkan bahwa pada tahap assessment, warga yang menyatakan partisipasi sangat tinggi sebanyak 6 responden (12%), tinggi 8 responden (16%), rendah 25 responden (50%), dan sangat rendah sebanyak 11 responden (22%). Pada tahap perencanaan sebanyak 7 responden (14%) menyatakan partisipasi masyarakat sangat tinggi, 11 responden (22%) tinggi, 19 responden (38%) rendah, dan 13 responden (26%) sangat rendah.

Selanjutnya hasil kuisioner tingkat partisipasi masyarakat pada tahap pelaksanaan menunjukkan bahwa sebanyak 16 responden (32%) menyatakan sangat tinggi, 25 responden (50%) tinggi, 5 responden (10%) rendah, dan 4 responden (8%) sangat rendah. Pada tahap evaluasi, hasil kuisioner menunjukkan bahwa warga yang menyatakan tingkat partisipasi masyarakat sangat tinggi sebanyak 4 responden (8%), 5 responden (10%) menyatakan sangat tinggi, 27 responden (54%) menyatakan rendah, dan sebanyak 14 responden (28%) menyatakan sangat rendah.

Analisis penulis, indeks partisipasi masyarakat cukup tinggi pada tahap assessment, tahap perencanaan, dan tahap evaluasi disebabkan karena yang dilibatkan hanya tokoh-tokoh masyarakat dan aparat RT sehingga banyak warga masyarakat yang tidak mengetahuinya.

Tingkat partisipasi masyarakat pada tahap pelaksanaan sangat tinggi karena pada tahap pelaksanaan pembangunan melibatkan warga masyarakat. Pada pembangunan Posyandu dan pembangunan jalan kampung hampir semua warga ikut dalam pembangunan. Bentuk-bentuk partisipasi masyarakat antara lain sumbangan pemikiran, tenaga, maupun materi.

Pembangunan Jalan Kampung

Berdasarkan hasil angket yang disebarakan kepada 50 responden diketahui bahwa indeks partisipasi masyarakat pada tahap assessment, tahap perencanaan, dan tahap pelaksanaan dalam kategori tinggi. Pada tahap evaluasi termasuk rendah.

Hasil kuisisioner menunjukkan bahwa pada tahap assessment, warga yang menyatakan partisipasi sangat tinggi sebanyak 10 responden (20%), tinggi 7 responden (14%), rendah 21 responden (42%), dan sangat rendah sebanyak 12 responden (24%). Pada tahap perencanaan sebanyak 12 responden (24%) menyatakan partisipasi masyarakat sangat tinggi, 20 responden (40%) tinggi, 8 responden (16%) rendah, dan 10 responden (20%) sangat rendah.

Selanjutnya hasil kuisisioner indeks partisipasi masyarakat pada tahap pelaksanaan menunjukkan bahwa sebanyak 24 responden (48%) menyatakan sangat tinggi, 9 responden (18%) tinggi, 8 responden (16%) rendah, dan 9 responden (18%) sangat rendah. Pada tahap evaluasi, hasil kuisisioner menunjukkan bahwa warga yang menyatakan indeks partisipasi masyarakat sangat tinggi sebanyak 9 responden (18%), 6 responden (12%) menyatakan sangat tinggi, 16 responden (32%) menyatakan rendah, dan sebanyak 19 responden (38%) menyatakan sangat rendah.

Berdasarkan hasil kuisisioner indeks partisipasi masyarakat baik pada pembangunan posyandu maupun pembangunan jalan kampung menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat termasuk kategori tinggi. Menurut penulis, hal ini berhubungan dengan kondisi sosiologis responden yang berada di daerah pedesaan dimana kearifan lokal (adat istiadat, gotong royong, keagamaan) masih terjaga dengan baik.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka penulis menyimpulkan sebagai berikut :

1. Dalam pembangunan fasilitas umum di Kampung Rukun Damai Kecamatan Long Bagun Kabupaten Mahakam Ulu sudah melibatkan partisipasi masyarakat baik dalam tahap assessment, tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, dan tahap evaluasi.
2. Bentuk-bentuk partisipasi masyarakat dalam pembangunan fasilitas umum di Kampung Rukun Damai pada tahap assessment, tahap perencanaan, dan tahap evaluasi lebih dominan berbentuk sumbangan pemikiran atau ide, sedangkan pada tahap pembangunan bentuk-bentuk partisipasi masyarakat antara lain sumbangan pikiran, tenaga, maupun materi.
3. Indeks partisipasi masyarakat Kampung Damai Kecamatan Long Bagun dalam kategori tinggi baik pada pembangunan posyandu maupun pembangunan jalan kampung. Hal ini berhubungan dengan kondisi sosiologis dan masih terjaganya kearifan lokal di daerah tersebut.

Saran

1. Sebaiknya Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu melibatkan masyarakat dalam pembangunan fasilitas-fasilitas umum, sehingga masyarakat merasa memiliki fasilitas-fasilitas umum yang dibangun tersebut karena beberapa

- kegiatan pembangunan (misalnya pengecoran jalan gang) dikerjakan oleh kontraktor tanpa melibatkan warga masyarakat.
2. Aparat Kampung Rukun Damai sebaiknya melibatkan lebih banyak masyarakat dalam tahapan assessment, perencanaan, dan evaluasi program atau kegiatan pembangunan fasilitas umum. Hasil penelitian penulis menunjukkan bahwa aparat desa hanya mengundang tokoh-tokoh masyarakat saja pada saat assessment dan perencanaan. Dengan melibatkan lebih banyak partisipasi masyarakat diharapkan perencanaan pembangunan lebih matang dan terencana dengan banyaknya sumbangan pemikiran dan ide-ide dari masyarakat.

Daftar Pustaka

- Gaventa, John & Camilo Valderama. 2001. *Mewujudkan Partisipasi: 21 Teknik Mewujudkan Partisipasi Masyarakat Untuk Abad 21*. Jakarta: The British Council.
- Ife, Jim & Frank Tesoriero. (2008). *Community Development: Alternatif Pengembangan Masyarakat Di Era Globalisasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Jakti, Hero U. Kuntjoro dan Ibramsyah, 1987. *Si Miskin : Dalam Perhitungan Kekuasaan*. Fisip UI : Jurnal Penelitian Sosial
- Lincoln, Y.S. dan Guba, E.G., 1985. *Effective Evaluation*. San Francixco : Jossey-Bass Publishers
- Mikkelsen, Britha. 2003. *Metode Penelitian Parsipatoris Dan Upaya-Upaya Pemberdayaan: Sebuah Buku Pegangan Bagi Para Praktisi Lapangan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia
- Miles, B.B., dan A.M. Huberman, 1992. *Analisa Data Kualitatif*. Jakarta : UI Press
- Moleong, Lexy J. 2005. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Muniarti, Nunuk P. 2004. *Getar Gender: Perempuan Indonesia Dalam Perspektif Agama, Budaya, Dan Keluarga*. Magelang: Indonesiatera.
- Nasution. 2003. *Metode Research: Penelitian Ilmiah*. Jakarta: PT. Bumi Aksara
- Ndraha, Taliziduhu. 2000. *Pembangunan Masyarakat, Mempersiapkan Masyarakat Tinggal Landas*. Jakarta: Rineka Cipta
- Pusat Bahasa Depdiknas. 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta : Pusat Bahasa
- Rahardjo, Adisasmita. 2006. *Pembangunan Perdesaan dan Perkotaan*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Reksopoetranto. 1992. *Manajemen Proyek Pembangunan*. Jakarta : Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia
- Rukminto, Adi, Isdandi. (2003). *Pemikiran-Pemikiran dalam Pembangunan Kesejahteraan Sosial*. Jakarta: Lembaga Penerbit FE-UI.

- Saragi, Tumpal P. 2004. *Mewujudkan Otonomi Masyarakat Desa: Alternatif Pemberdayaan Desa*. Yogyakarta: CV Cipruy
- Sastropoetra, R.A Santoso. 1998. *Partisipasi, Komunilasi, Persuasi dan disiplin Dalam Pembangunan Nasional*. Bandung: Alumni.
- Siagian, Sondang P. 2004. *Teori Pengembangan Organisasi*. Jakarta : Gunung Agung
- Soetrisno, Loekman, 1995. *Menuju Masyarakat Partisipatif*. Yogyakarta : Kanisius.
- Slamet, Y. 1993. *Pembangunan Masyarakat Berwawasan Partisipasi*, Surakarta, Sebelas Maret University Press.
- Todaro, Michael. 2000. *Pembangunan Ekonomi Di Dunia Ketiga*. Jakarta : Erlangga
(<http://wartaekonomi.co.id/berita8641/ipm-indonesia-2012-tempati-ranking-121-di-dunia- html>).